

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa saat ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai saluran penyampai berita, tetapi dalam sistem politik modern media berfungsi sebagai aktor penting yang turut mempengaruhi proses pembuatan suatu program dan pembentukan preferensi masyarakat. Dalam konteks demokrasi digital, mekanisme penyebaran informasi yang dipercepat oleh platform-platform daring telah memperkuat kapasitas media untuk membingkai isu dan membentuk makna politik yang kemudian dipakai aktor-aktor politik dalam arena publik. Pada kenyataannya media dapat mengarahkan perhatian publik dan juga perilaku pemilih dengan cara bagaimana mereka menyajikan suatu isu atau informasi serta terdapat agenda-setting. Dengan demikian, memahami media sebagai bagian dari struktur kekuasaan penting untuk menjelaskan dinamika hubungan antara informasi, opini dan legitimasi politik (Sakina & Hendrik, 2025).

Dalam sistem demokrasi, media diharapkan menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang, serta menjaga independensi dari kepentingan politik tertentu. Media seharusnya menghadirkan berbagai perspektif secara proporsional agar publik dapat membentuk penilaian rasional terhadap program yang diambil oleh aktor politik. Dalam konteks program yang digagas oleh aktor politik, media idealnya tidak membangun konstruksi makna yang mengarahkan opini pada legitimasi. Namun, praktik media tidak sepenuhnya ada pada ruang yang netral. Dengan tekanan kompetisi antar media dan dinamika kecepatan produksi berita sering memengaruhi cara suatu isu dikemas. Maka dari itu, media berpotensi untuk memperkuat legitimasi suatu program ataupun justru mendelegitimasi diruang publik.

Media dapat dipahami sebagai ruang kontestasi wacana, dimana media dijadikan sebagai tempat berbagai kepentingan saling berhadapan dan bernegosiasi. Didalam ruang ini, negara dan elite politik memanfaatkan media untuk membangun serta

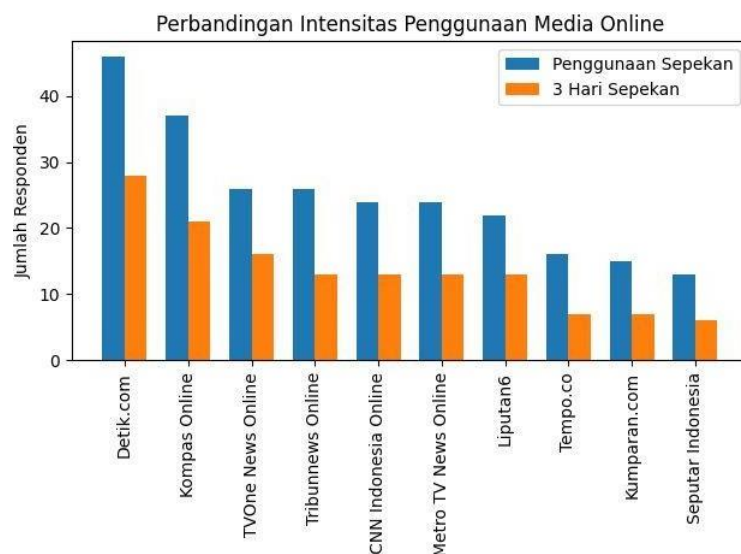
menyebarkan narasi yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan program mereka. Disisi lain, kelompok masyarakat sipil dan aktor oposisi tidak bersifat pasif, melainkan berupaya menantang, mengkritisi atau merebut dominasi narasi yang telah dibangun tersebut. Contohnya yaitu praktik kampanye dan pembentukan citra politik melalui media pada pemilu 2024, memperlihatkan bagaimana aktor politik menginstruksikan penggunaan platform untuk tujuan kekuasaan dan memunculkan ketegangan antara fungsi normatif dan instrumental media (Lestari et al., 2024).

Di era digital saat ini, dinamika relasi antara media dan kekuasaan menunjukan transformasi yang signifikan seiring dengan bergesernya pola komunikasi politik ke ruang digital. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memperluas jangkauan distribusi pesan politik, tetapi juga mengubah cara aktor-aktor politik memproduksi, mengelola, dan mengendalikan arus informasi di ruang publik. Media digital menghadirkan ruang yang lebih cepat dan interaktif, sehingga batas antara produsen informasi, aktor politik, dan khalayak menjadi semakin kabur. Dalam konteks ini, media tidak lagi beroperasi sebagai institusi yang sepenuhnya otonom, melainkan terintegrasi dalam kekuasaan yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengaruh politik (Fathurokhmah, 2021).

Di Indonesia sendiri media digital berlangsung seiring dengan meningkatkan penetrasi internet yang menjadikan ruang daring sebagai arena utama pertukaran informasi publik. Berdasarkan laporan DataReportal, pada awal tahun 2025 terdapat sekitar 212 juta individu yang telah terhubung dengan internet, hal tersebut menunjukan tingkat penetrasi yang semakin masif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Kondisi ini menandai pergeseran struktural dalam pola konsumsi informasi, dimana masyarakat tidak lagi bergantung pada media cetak ataupun televisi sebagai sumber utama dalam mencari informasi. Karna pada dasarnya media digital hadir sebagai medium yang lebih cepat, fleksibel dan mudah diakses, sehingga memperluas jangkauan distribusi informasi sosial-politik (Lubis & Abdullah, 2025; Trilestari et al., 2025).

Pergeseran konsumsi informasi ke media digital tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya penetrasi internet, tetapi juga oleh pola penggunaan media online sebagai

sumber utama berita. Dalam konteks ini, intensitas akses terhadap portal berita tertentu menjadi indikator penting untuk memahami media mana yang paling berpengaruh dalam membentuk opini publik. Untuk memperlihatkan kecenderungan tersebut, berikut disajikan data perbandingan intensitas penggunaan sejumlah media online nasional sebagai sumber informasi berita.



Gambar 1. 1 Perbandingan Intensitas Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi Berita

Sumber: Databoks (2025)

Data pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa *detik.com* dan *kompas.com* menduduki posisi teratas sebagai media pemberitaan yang paling sering diakses responden, baik dalam kategori penggunaan selama sepekan maupun dalam tiga hari terakhir. *detik.com* tercatat sebagai media dengan intensitas akses tertinggi, diikuti oleh *kompas.com*, sementara media online lain seperti *Tempo.co*, *Kumparan.com*, dan *Liputan6* berada pada tingkat penggunaan yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa *detik.com* dan *kompas.com* memiliki jangkauan audiens yang lebih luas dan tingkat eksposur yang lebih tinggi dalam keseharian masyarakat dibandingkan media online lainnya.

Tingginya intensitas penggunaan kedua media tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan yang diproduksi *detik.com* dan *kompas.com* memiliki potensi besar

dalam membentuk persepsi, opini, dan sikap publik terhadap isu sosial-politik. Dalam konteks program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, dominasi kedua media ini menjadi signifikan karena framing yang mereka bangun berpeluang lebih luas untuk mempengaruhi cara masyarakat menangkap, menilai, dan menanggapi program tersebut. Oleh karena itu, pemilihan *detik.com* dan *kompas.com* sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris mengenai tingkat konsumsi media serta posisi strategis keduanya dalam ekosistem media online nasional.

Kompas.com dan *detik.com* merupakan dua portal berita online dengan karakteristik editorial yang berbeda meskipun keduanya berperan besar dalam memberitakan isu-isu politik. *kompas.com* sering diposisikan sebagai media yang cenderung mengutamakan keberimbangan narasumber dan penyajian yang lebih kontekstual dan komprehensif dalam teks pemberitaannya. *kompas.com* cenderung memberi ruang pemberitaan yang mendalam serta menampilkan berbagai perspektif dalam menyampaikan sebuah isu, termasuk perspektif dari pihak pemerintah maupun masyarakat umum (Meriani, 2024).

Sementara itu, *detik.com* dikenal sebagai salah satu portal berita daring yang mengutamakan kecepatan dan aktualitas dalam penyajian berita. Model produksi berita dari media *detik.com* sering kali menonjolkan aspek berita yang terkini dan langsung pada inti peristiwa, sehingga gaya penyajiannya lebih ringkas dan responsif terhadap perkembangan isu terbaru (Siahaan & Vera, 2024). Adapun perbedaannya yaitu, *detik.com* cenderung fokus pada unsur konflik dan dinamika terbaru dari peristiwa yang dilaporkan, sementara *kompas.com* lebih berupaya menempatkan isu dalam kerangka naratif yang lebih luas dan analitis (Pangidoan, 2024).

Karakteristik ini menunjukkan bahwa meskipun kedua media sama-sama berpengaruh dalam pembentukan opini publik, pendekatan dan gaya pemberitaan yang digunakan masing-masing media dapat berbeda secara signifikan. Perbedaan ini menjadi dasar rasional bagi komparasi konstruksi framing pemberitaan dalam penelitian ini, karena variasi pendekatan editorial berpotensi menghasilkan makna politik dan legitimasi yang berbeda terhadap program yang sama.

Dominasi media online semakin diperkuat dengan tingginya penggunaan media sosial sebagai pintu masuk utama konsumsi berita. DataReportal mencatat bahwa pada Januari 2025 terdapat sekitar 143-180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia, setara dengan lebih dari separuh populasi di Indonesia, hal tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara platform sosial dan distribusi informasi politik. Generasi muda menjadi kelompok yang paling intens dalam mengonsumsi berita melalui portal daring dan media sosial, hal ini menjadikan media online sebagai sumber utama dalam membentuk pandangan politik mereka. Dalam kondisi tersebut, portal berita online saling bersaing untuk menyajikan informasi secepat mungkin, sehingga pemberitaan sering lebih didorong untuk mengutamakan dalam mendapatkan banyak klik dan menjadi viral (Nur Fitria, 2025).

Implikasi politik dari dominasi media online terletak pada besarnya pengaruh framing berita terhadap pembentukan opini publik dan sikap masyarakat terhadap program, program ataupun aktor politik. Dalam konteks kecepatan dan viralitas, cara media membingkai suatu isu menjadi salah satu faktor penentu apakah suatu program diterima, diperdebatkan, atau ditolak oleh masyarakat. Framing juga berperan penting dalam membangun citra politik, baik melalui penonjolan aspek positif maupun menolak aktor tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Tasrif (2025) bahwa media online bukanlah suatu ruang yang dianggap netral, melainkan suatu arena strategis yang digunakan untuk memproduksi dan mereproduksi makna kekuasaan. Oleh karena itu, dominasi media online menjadikan framing berita sebagai alat politik yang semakin efektif dalam memengaruhi dinamika demokrasi kontemporer.

Media online dalam konteks program yang dibuat oleh aktor politik ataupun program publik tidak dapat diposisikan sebagai aktor yang netral dan bebas nilai, tetapi dapat diposisikan sebagai entitas yang aktif dalam memilih sudut pandang tertentu dalam merepresentasikan realitas politik. Pilihan sudut pandang tersebut tercermin dalam cara media menyeleksi isu, menentukan narasumber, serta menonjolkan aspek tertentu dari sebuah program atau program. Sejalan dengan yang dibahas oleh Kusumaningsih (2024) bahwa media online sering kali ikut membentuk cara suatu isu dipahami oleh masyarakat, dengan cara makna yang

disampaikan melalui pemberitaan tersebut dapat secara langsung memengaruhi bagaimana publik menilai, menerima, atau menolak program yang diusulkan oleh seorang aktor politik atau program yang dibuat oleh negara. Dalam praktiknya, pemberitaan media dapat berpotensi sebagai alat untuk memperkuat legitimasi dengan menampilkan program atau program sebagai solusi yang rasional dan diperlukan. Sebaliknya, media juga berpotensi mendelegitimasi tindakan negara dengan menekankan konflik, dampak negatif, ataupun ketimpangan kekuasaan yang ditimbulkan.

Proses tersebut dapat dipahami dengan pendekatan teoritis framing Entman yang dijelaskan dalam penelitian Pangestu & Shabana (2024) bahwa media membingkai kenyataan melalui empat mekanisme, yakni pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral dan rekomendasi solusi. Dalam konteks program atau program, framing menentukan apakah suatu program dipersepsikan sebagai masalah sosial yang mendesak atau sebagai langkah represif seorang aktor atau negara. Media juga berperan dalam mengarahkan siapa yang dianggap bertanggung jawab, apakah pemerintah, kelompok tertentu, atau kondisi struktural. Nilai nilai yang ditekankan dalam pemberitaan seperti keamanan, ketertiban, keadilan atau hak asasi akan mempengaruhi cara publik menilai legitimasi program tersebut. Dengan demikian, framing bukan hanya sekedar suatu teknik yang digunakan dalam jurnalistik, melainkan mekanisme politik, yang memediasi relasi antara kekuasaan dan opini publik.

Dalam praktik politik, fungsi framing pada media online menjadi sangat penting karena dapat berperan sebagai alat pembenaran kekuasaan sekaligus sebagai sarana kritik dan resistensi. Ketika media menarasikan program secara afirmatif, framing berfungsi untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan menormalisasikan keputusan aktor ataupun negara dimata publik. Sebaliknya, framing yang kritis dapat membuka ruang resistensi dengan menyoroti ketimpangan, pelanggaran, atau dampak sosial yang terabaikan. Perbedaan framing antar media sering kali merefleksikan posisi ideologis dan kepentingan politik yang beragam. Oleh karena itu, peran media online menjadi sangat penting terutama ketika program yang ditampilkan bersifat kontroversial dan menyentuh kepentingan semua masyarakat,

karena framing pemberitaan akan menentukan arah perdebatan dan pembentukan legitimasi politik (Mezy & Amali, 2025).

Pentingnya framing media online dalam membentuk legitimasi dan resistensi politik, sehingga program-program yang bersifat kontroversial sering menjadi arena utama pertarungan wacana di ruang publik. Program yang menyentuh isu pendidikan, disiplin sosial, dan intervensi negara terhadap perilaku masyarakat cenderung memicu perdebatan karena bersinggungan langsung dengan nilai, hak dan pengalaman masyarakat. Dalam konteks ini, negara atau aktor politik tidak hanya dinilai dari aspek efektivitas program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dapat diterima secara moral dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Penelitian yang dibahas oleh Syahira (2025) menjelaskan bahwa program yang bersifat sensitif sering kali diperdebatkan melalui narasi media yang saling bertentangan, antara dukungan dan kritik. Dengan demikian, program kontroversial menjadi titik temu antara program dan konstruksi makna politik di media.

Lebih jauh lagi, program-program tersebut membuka ruang konflik dan perbedaan ideologi yang tajam antara aktor politik, media, dan masyarakat. Pendekatan negara yang dianggap koersif sering diposisikan sebagai upaya penegakan ketertiban oleh satu pihak, namun dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil oleh pihak lain. Media berperan penting dalam memperbesar atau meredam suatu konflik melalui cara dengan menampilkan isu yang dikemas dan aktor yang ditampilkan. Sama halnya dengan penelitian yang dibahas oleh Putri (2025) bahwa media menjadi arena pertarungan wacana antara pihak pendukung dan penentang program. Dalam proses ini, framing media berperan menentukan isu mana yang dianggap penting dan layak untuk ditampilkan. Akibatnya, perdebatan publik tidak semata berfokus pada substansi program tersebut, melainkan pada perebutan legitimasi atas makna setuju ataupun menentang dan benar atau salah (Fahruraji Annur, 2025).

Fenomena program kontroversial di Indonesia muncul melalui program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Program ini disebut sebagai upaya pembinaan karakter dan penegakan disiplin bagi pelajar yang dianggap menyimpang dari norma sosial.

Program ini langsung menarik perhatian publik karena melibatkan institusi militer dalam ranah pendidikan. Isu ini menjadi sensitif karena menyentuh dimensi hak anak, pendidikan, dan pendekatan koersif negara. Maka dari itu media kemudian memainkan peran penting dalam membingkai program tersebut. Menurut Amran (2025) menjelaskan bahwa pendekatan militeristik yang diterapkan dalam program barak militer, meskipun dimaksudkan untuk membentuk kedisiplinan dan karakter, dipandang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pendidikan yang humanistik karena cenderung memperlakukan siswa bermasalah layaknya objek disiplin semata dan mengabaikan kebutuhan psikososial mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, program tersebut pada hakikatnya mencerminkan sebuah logika penanganan masalah sosial yang menekankan kontrol dan ketertiban dari pada pembangunan kapasitas internal peserta didik untuk memahami, menginternalisasi, dan mengubah perilaku mereka secara berkelanjutan.

Program pengiriman siswa ke barak militer mulai berjalan pada Mei 2025 dengan melibatkan TNI di beberapa wilayah Jawa Barat. Sasaran program ini adalah siswa yang dianggap sering melakukan pelanggaran seperti bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan perilaku menyimpang lainnya. Menurut Anwari (2025) pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan karakter di lingkungan barak militer dirancang untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan moral siswa sehingga dapat mengatasi perilaku negatif secara struktural. Namun demikian, pelibatan institusi militer dalam proses pembinaan siswa memunculkan pertanyaan kritis mengenai batas kewenangan aktor atau pemerintah, khususnya terkait peran aparat keamanan dalam ranah pendidikan dan pembinaan anak. Dengan begitu, program ini berkembang menjadi perdebatan publik yang luas dengan melibatkan akademisi, aktivis hak anak, media, dan masyarakat sipil dalam menilai legitimasi, dampak serta implikasi jangka panjang dari pendekatan yang diambil pemerintah daerah.

Seiring dengan pelaksanaannya, data pelaksanaan menunjukkan bahwa program ini telah diaplikasikan secara nyata di lapangan. Sejak dimulainya program pada awal Mei 2025, tercatat bahwa sebanyak 272 siswa bermasalah dari berbagai sekolah di Jawa Barat telah dikirimkan ke barak militer untuk mengikuti program

pembinaan disiplin dan karakter yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Peserta tersebut berasal dari 106 sekolah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di provinsi ini, meliputi siswa dari sekolah menengah atas negeri dan swasta maupun sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta. Data ini menunjukkan bahwa program ini tidak bersifat eksperimental skala kecil, tetapi sudah melibatkan ratusan pelajar dari banyak daerah di Jawa Barat, sehingga pemberitaan media tentang program tersebut memiliki relevansi empiris yang kuat serta mempengaruhi persepsi publik mengenai program yang kontroversial ini.

Respon publik terhadap program ini bukan hanya terpolarisasi secara sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana media massa membentuk dan memperluas persepsi masyarakat terhadap isu program tersebut, dimana representasi media memiliki peran penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu sosial dan politik yang dipublikasikan. Menurut Febriana (2024) bahwa representasi media massa dalam pemberitaan isu sosial dan politik berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat, karena cara media memilih kata, struktur kalimat, serta narasi dapat membentuk makna sosial dan interpretasi publik terhadap suatu isu. Pemberitaan yang mendukung maupun yang mengkritik program tersebut semakin menegaskan adanya perbedaan pandangan di ruang publik, dengan adanya Perbedaan ini tidak hanya muncul sebagai pendapat pribadi masyarakat, tetapi juga dibentuk dan diperkuat melalui cara media membingkai isu tersebut. Dalam konteks wacana publik, media sosial dan media digital sering kali menjadi arena pembentukan opini yang bisa memengaruhi baik dukungan maupun penolakan terhadap program pemerintah maupun program yang dibuat oleh aktor politik melalui penyebaran informasi yang beragam dan terkadang kontradiktif (Resman Palestin, 2025). Akhirnya, perbedaan representasi dan interpretasi media ini turut memperluas ruang diskusi publik, menjadikan media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai arena utama perdebatan pro dan kontra program dalam masyarakat.

Program yang telah diperkenalkan ke publik memicu kritik masyarakat yang semakin menguat ketika muncul laporan ke Bareskrim dan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak anak. Penempatan siswa di lingkungan militer dinilai

bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak, khususnya terkait dengan hak atas pendidikan dan pengembangan diri yang bebas dari metode-metode yang bersifat memaksa. Dalam konteks ini, isu tersebut memperluas perdebatan publik dari yang awalnya membahas mengenai efektivitas program tersebut menjadi persoalan etika, hak asasi manusia, dan legitimasi kekuasaan negara terhadap warga negara usia anak sampai remaja. Dengan demikian media memainkan peran sentral dalam mengangkat dan memperluas isu ini ke ruang publik, karena framing pemberitaan terbukti berpengaruh signifikan dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap program kontroversia (Kustiawan, 2025).

Media online nasional di Indonesia berkembang dengan karakter editorial, ideologi, dan tradisi jurnalisme yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan variasi pemberitaan yang signifikan terhadap isu program barak militer. Setiap media membawa nilai dan kepentingan tertentu yang memengaruhi proses seleksi isu, penentuan sudut pandang, serta penekanan aspek program, baik dari perspektif keamanan, pendidikan, maupun hak anak. Perbedaan latar belakang institusional dan orientasi ideologis media tersebut berkontribusi langsung pada terbentuknya narasi yang beragam, terutama dalam isu kontroversial yang sarat dengan relasi kekuasaan. Dalam konteks media online, kompetisi atensi publik semakin mendorong media untuk menegaskan posisi editorialnya, sehingga media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membangun konstruksi sosial yang memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi program. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian framing media untuk mengurai bagaimana realitas dikonstruksi dan diarahkan.

Perbedaan karakter media online nasional tampak dalam pemilihan narasumber, diksi, dan sudut pandang pemberitaan program barak militer bagi siswa bermasalah, di mana media pro-pemerintah menekankan narasi ketertiban dan efektivitas program melalui sumber resmi, sementara media kritis lebih menonjolkan perspektif masyarakat sipil dan pakar yang mempertanyakan dasar normatifnya. Pilihan kata dan penekanan isu ini secara tidak langsung membentuk cara publik memahami masalah, apakah sebagai solusi atau sebagai ancaman terhadap nilai

demokrasi, yang mencerminkan karakter dan orientasi editorial masing-masing media. Penelitian framing semacam ini menguatkan bahwa media tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi juga berperan dalam konstruksi realitas politik publik melalui strategi simbolik dalam membangun makna politik dalam pemberitaan isu kontroversial (Setyawan, 2025).

Dalam perspektif ilmu politik, analisis framing digunakan sebagai alat analitis untuk membaca makna politik yang tersembunyi dibalik teks media, terutama dalam konteks program atau program publik dan juga relasi kekuasaan. Media tidak pernah sepenuhnya netral karena setiap proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, dan penghilangan aspek lain merupakan praktik politik simbolik yang membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, framing menjadi pendekatan penting untuk memahami bagaimana media berperan dalam memproduksi, mereproduksi, dan menegosiasikan makna di ruang publik. Dengan demikian framing media sendiri memengaruhi cara masyarakat untuk memahami program dan aktor politik, bukan hanya melalui isi berita, tetapi juga melalui struktur narasi dan logika penyajiannya (Widyaya & Setiawan, 2023).

Dari pembahasan diatas, penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai kualitas jurnalistik media atau kepatuhan terhadap etika pers, tetapi memfokuskan perhatian pada makna politis program yang dikonstruksikan melalui pemberitaan. Media dipahami sebagai aktor yang turut berperan dalam membentuk legitimasi suatu program dimata masyarakat. Dalam konteks program yang kontroversial, framing media menjadi arena utama bagi pertarungan makna antara pemerintah, elite politik, dan kelompok masyarakat. Maka dari itu, perbedaan framing antar media dapat menghasilkan persepsi masyarakat yang berbeda terhadap program yang sama (Muharrom, 2025). Hal tersebut menegaskan bahwa teks media merupakan ruang strategis untuk membaca relasi kekuasaan.

Meskipun kajian tentang framing media dan relasinya dengan kekuasaan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih memosisikan framing sebatas sebagai teknik konstruksi berita atau pembentukan opini publik secara umum. Keterkaitan framing media dengan proses legitimasi program, khususnya pada program pemerintah yang kontroversial dan menyentuh isu sensitif seperti

pendidikan, disiplin sosial, dan hak anak, masih relatif terbatas. Di sisi lain, pembahasan mengenai program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer lebih sering dilihat dari perspektif normatif, program pendidikan, atau hak asasi manusia, sementara peran media online nasional dalam mengonstruksikan makna politik dan legitimasi tersebut belum banyak dikaji. Padahal, dalam konteks dominasi media digital, framing media arus utama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan atau penolakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komparatif framing *kompas.com* dan *detik.com* dalam membingkai program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dalam kerangka legitimasi program.

Atas dasar itu, penelitian ini mengunci objek kajian secara lebih spesifik dengan memilih *kompas.com* dan *detik.com* sebagai media yang dianalisis, karena keduanya secara konsisten memberitakan isu program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer selama periode penelitian. Isu yang dikaji adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, yang memunculkan perdebatan terkait pendidikan, disiplin, dan hak anak. Fokus utama analisis diarahkan pada bagaimana kedua media tersebut membingkai program tersebut sebagai bagian dari proses konstruksi wacana legitimasi program. Melalui analisis framing, penelitian ini berupaya mengungkap cara media mengonstruksi wacana legitimasi program tersebut, apakah cenderung memperkuat penerimaan terhadap program atau justru mengarah pada pelemahan legitimasi. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi penghubung langsung untuk merumuskan masalah penelitian dan menetapkan tujuan kajian secara lebih terarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka yang akan menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana komparasi konstruksi framing pemberitaan *kompas.com* dan *detik.com* terhadap program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi?

2. Bagaimana konstruksi makna politik dalam framing pemberitaan *kompas.com* dan *detik.com* terhadap program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dalam perspektif legitimasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan utama yaitu:

1. Mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan framing yang dibangun oleh *kompas.com* dan *detik.com* dalam merepresentasikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer di ruang publik.
2. Mengembangkan pemahaman mengenai makna politik dari aspek legitimasi yang dikonstruksikan melalui framing pemberitaan *kompas.com* dan *detik.com* terhadap program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam memahami peran media online sebagai aktor politik dalam proses legitimasi program di era demokrasi digital. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai teori legitimasi politik dengan menunjukkan bahwa penerimaan dan penolakan terhadap program negara tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh konstruksi makna yang dibangun melalui framing media. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan teori framing Robert Entman sebagai alat analisis politik untuk membaca relasi antara media, kekuasaan dan program publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aktor politik dalam merancang komunikasi program yang lebih efektif dan sensitif terhadap nilai demokrasi, terutama pada program yang bersifat kontroversial. Bagi praktisi media, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai dampak politik framing pemberitaan terhadap pembentukan opini publik. Sementara itu, bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini

berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman kritis terhadap peran media online dalam membentuk persepsi publik dan dinamika kekuasaan di ruang publik.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi sebagai sebuah program yang menimbulkan perdebatan di ruang publik. Program tersebut tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif dalam bidang pendidikan, tetapi juga sebagai peristiwa politik karena melibatkan otoritas negara, penggunaan simbol militer, serta nilai-nilai kedisiplinan, pembinaan, dan hak anak yang dipertarungkan dalam diskursus publik. Dengan demikian, program ini merupakan objek komunikasi politik yang dikomunikasikan, ditafsirkan, dan diperdebatkan melalui media massa.

Media pemberitaan nasional seperti *kompas.com* dan *detik.com* berperan sebagai aktor komunikasi politik dalam kerangka demokrasi modern, dengan memanfaatkan teknik jurnalistik untuk menyampaikan informasi sekaligus membentuk realitas. Liputan media tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi politik yang dimediasi, di mana media memiliki wewenang untuk memilih sudut pandang, menentukan sumber informasi, serta menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu program.

Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik sebagai landasan konseptual utama. Teori ini menjelaskan bahwa relasi antara aktor politik, media, dan publik berlangsung dalam arena simbolik yang menghasilkan produksi makna politik. Dalam kerangka ini, pemberitaan media dipahami sebagai bentuk komunikasi politik yang berpotensi berkontribusi dalam pembentukan persepsi serta konstruksi legitimasi suatu program di ruang publik.

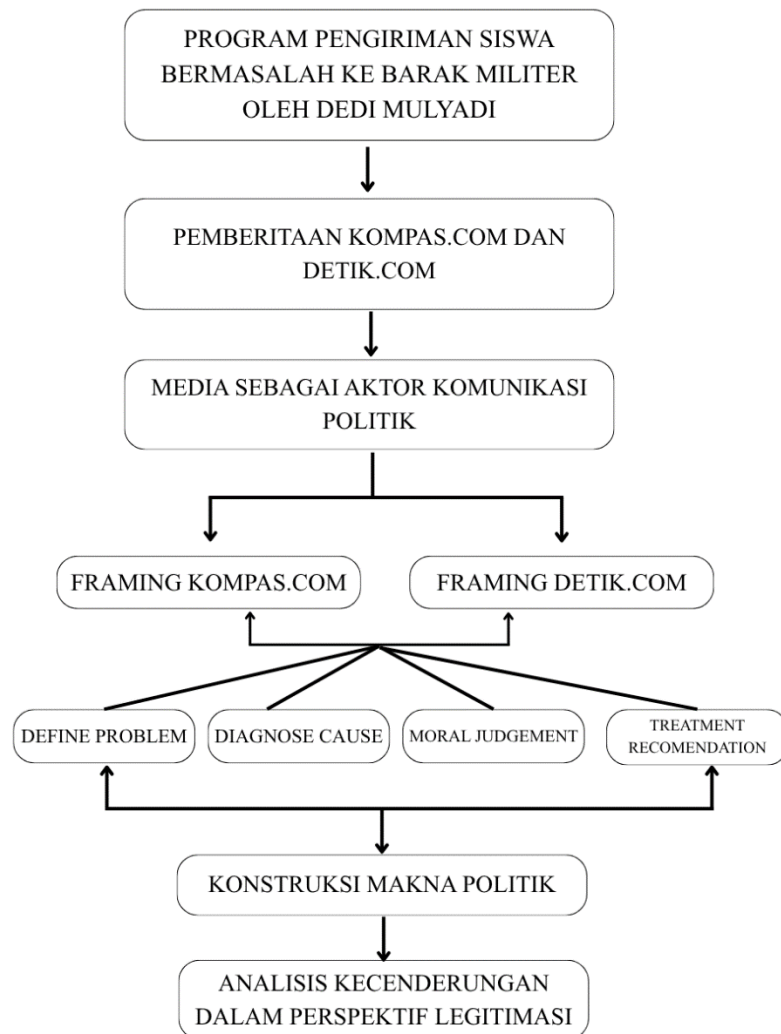
Selanjutnya, untuk menganalisis bagaimana makna tersebut dibentuk, penelitian ini menggunakan analisis framing. Framing digunakan untuk mengkaji bagaimana *kompas.com* dan *detik.com* membingkai program pengiriman siswa ke barak militer melalui empat perangkat analisis, yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), penentuan penyebab (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral*

judgement), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Keempat elemen ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur makna yang dibangun masing-masing media dalam merepresentasikan program tersebut.

Dalam penelitian ini, makna politik dipahami sebagai konstruksi makna yang terbentuk melalui proses seleksi, penonjolan, dan pengorganisasian realitas dalam teks pemberitaan yang merepresentasikan posisi aktor, penggunaan kewenangan, nilai, serta arah penerimaan atau penolakan terhadap program. Dengan demikian, makna politik dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil interpretasi terhadap konstruksi framing yang dibangun oleh media melalui proses pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian.

Hasil analisis framing dari kedua media kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan konstruksi realitas dalam pemberitaan yang dihasilkan oleh masing-masing media. Perbedaan dalam pendefinisian masalah, atribusi penyebab, penilaian moral, maupun rekomendasi penyelesaian dapat menunjukkan bagaimana masing-masing media mengonstruksi makna politik yang berbeda atas program yang sama.

Pada tahap akhir, konstruksi framing tersebut dianalisis menggunakan perspektif legitimasi untuk melihat kecenderungan penerimaan atau pelemahan legitimasi yang direpresentasikan dalam pemberitaan. Makna politik yang dibangun media berpotensi memperkuat legitimasi apabila program direpresentasikan sebagai solusi yang rasional, bermanfaat, dan dapat diterima secara normatif. Sebaliknya, konstruksi tersebut dapat mengarah pada delegitimasi apabila program direpresentasikan sebagai tindakan yang kontroversial, tidak sesuai dengan nilai tertentu, atau bermasalah dari aspek kewenangan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan alur logis dari program yang menjadi objek perdebatan politik, peran media sebagai aktor komunikasi politik, proses framing sebagai mekanisme konstruksi makna, komparasi pemberitaan, hingga analisis kecenderungan legitimasi dan delegitimasi yang direpresentasikan melalui pemberitaan di ruang publik.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti